



LAPORAN

RAPAT PENENTUAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI KANTOR BAHASA PROVINSI NTB

**KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2023**



HALAMAN PENGESAHAN

RAPAT PENENTUAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI KANTOR BAHASA PROVINSI NTB

Disahkan oleh
Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tanggal: 15 Januari 2023



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
NIP 198103092006042002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt., atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Penentuan Tim Kerja Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan ini merupakan komitmen Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mewujudkan tata kelola birokrasi bebas dari korupsi. Laporan ini disusun sebagai bukti pelaksanaan penentuan tim kerja ZI-WBK dengan terbuka sekaligus sebagai pemenuhan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang bersih dari praktik KKN. Selain itu, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi yang bersih dan bebas KKN dan berkomitmen meningkatkan pelayanan publik dengan prima Ber-AKHLAK dan CANTIK (Cepat, Akuntabel, Netral, Transparan, Inovatif, dan Kredibel).

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat, khususnya internal dan eksternal masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, 14 Januari 2023

Kepala,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas





DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tujuan Kegiatan	3
1.4 Hasil yang Diharapkan.....	3
BAB II HASIL RAPAT PENENTUAN TIM KERJA ZI-WBK TAHUN ANGGARAN 2023	4
2.1 Pengungkit I	4
2.2 Pengungkit II	7
2.3 Pengungkit III.....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Pengungkit IV	Error! Bookmark not defined.
2.5 Pengungkit V	Error! Bookmark not defined.
2.6 Pengungkit VI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III SIMPULAN DAN REKOMENDASI	25
3.1 Simpulan.....	25
3.2 Rekomendasi	25
Lampiran	44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemendikbudristek bertekad menanamkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi ke dalam program pendidikan. Dengan mempertimbangkan integritas Kemendikbudristek tersebut, pembangunan Zona Integritas menuju WBK di lingkungan Kemendikbudristek ditetapkan. Sebagai bagian dari Kemendikbudristek, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat selayaknya pula memiliki komitmen integritas yang tinggi dalam menciptakan wilayah kerja yang bebas dari korupsi. Guna mendukung sikap tersebut perlu dilakukan upaya-upaya nyata dalam layanan birokrasi dilingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien sehingga instansi pemerintah dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi pemerintah mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya

tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk membuat ketiga sasaran tersebut tercapai dengan baik, perlu dilakukan pembentukan tim kerja reformasi birokrasi dalam mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi. Tim RBI ini diharapkan memiliki komitmen yang teguh dalam mewujudkan ZI-WBK serta kompetensi yang sesuai dengan bidang perubahan yang akan dibuat. Oleh karena itu, dilakukan Rapat Penentuan Tim Kerja Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi Kantor Bahasa Provinsi NTB untuk memastikan penentuan dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan kompetensi pegawai dalam area-area perubahan yang dituju.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 sebagai berikut.

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

1.3 Tujuan Kegiatan

Tujuan Kegiatan ini adalah untuk membentuk TIM Reformasi Birokrasi Internal yang berkomitmen dalam mewujudkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi.

1.4 Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari laporan ini adalah mendokumentasikan proses penentuan tim kerja ZI-WBK sebagai bentuk akuntabilitas dan pemenuhan kelengkapan dokumen dan kesiapan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meraih predikat kantor yang memiliki komitmen Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).

BAB II

HASIL RAPAT PENENTUAN TIM KERJA ZI-WBK KANTOR BAHASA PROVINSI NTB

Pelaksanaan Rapat Penentuan Tim Kerja ZI-WBK Kantor Bahasa Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

2.1 Penyusunan Mekanisme Penentuan Tim Kerja ZI-WBK

Mekanisme pemilihan tim kerja telah dibuat sebagai dasar pembentukan tim kerja. Mekanisme ini disusun melalui rapat kerja yang dipimpin oleh Koordinator Tim RBI dan koordinator tiap pengungkit di Tahun 2022 bersama dengan Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB.

Rapat dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2023 di ruang Anjani Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rapat ini sekaligus membahas Buku Panduan RBI Tahun 2023 yang akan menjadi pedoman bagi tim kerja ZI-WBK dalam membangun ZI-WBK. Mekanisme penentuan tim kerja menjadi salah satu materi yang termuat dalam buku panduan ini.

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan pengalaman pembangunan ZI-WBK yang telah dilakukan dalam dua tahun terakhir, dihasilkan alur

mekanisme penentuan Tim Kerja ZI-WBK sebagai berikut.

Personel	Koordinator Tim ZI-WBK Tahun 2022	Kepala Kantor
	Mengusulkan daftar nama calon anggota Tim ZI-WBK sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan	
		Keputusan pemilihan Tim ZI- WBK dibicarakan dalam rapat bersama Kepala Kantor
	Menyusun konsep SK Tim ZI-WBK	
		Kepala Kantor menetapkan SK pengangkatan Tim
	Koordinator TU memproses penomoran SK Tim ZI-WBK	
SK Tim ZI-WBK dibagikan kepada personel terpilih		
	Hasil penentuan tim ZI-WBK dirangkum dalam laporan.	

Terdapat perubahan mekanisme penunjukan Tim Kerja ZI-WBK di tahun 2023 ini. Semula, daftar nama diusulkan oleh Koordinator TU. Pada tahun 2023, daftar nama tim ditentukan oleh Koordinator Tim RBI Tahun 2022 bersama koordinator pengungkit tahun 2022. Perubahan ini dilakukan karena tim di tahun sebelumnya dianggap lebih terlibat langsung dalam pembangunan ZI-WBK Tahun 2022. Pertimbangan pemilihan tim kerja didasarkan pada kriteria Tim Kerja yang telah ditentukan, yakni dengan memperhatikan kompetensi pegawai dalam area-area perubahan yang dibutuhkan untuk membangun ZI-WBK. Rapat ini turut menghasilkan kriteria tim ZI-WBK sebagai berikut.

Kriteria Tim Kerja ZI-WBK

1. Tim merupakan pegawai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Tim memiliki kompetensi sesuai bidang tugas dalam tim.
3. Tim memiliki komitmen untuk melakukan perubahan.
4. Tim sehat jasmani dan rohani.

2.2 Pelaksanaan Penentuan Tim Kerja ZI-WBK Kantor Bahasa Provinsi NTB

Penentuan Tim Kerja ZI-WBK Kantor Bahasa Provinsi NTB dilakukan dengan mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB, Koordinator RBI Tahun 2022, dan seluruh koordinator pengungkit tim kerja tahun 2022. Rapat dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Januari 2023.

Sebelumnya, koordinator tim kerja dan koordinator pengungkit telah mengusulkan daftar nama calon tim kerja pada tiap pengungkit masing-masing. Daftar nama tersebut dievaluasi dalam rapat dengan mempertimbangkan kesesuaian kompetensi pegawai dengan komponen pengungkit. Rapat ini menghasilkan nama-nama koordinator pengungkit sebagai berikut:

Pengungkit I: Nurcholis Muslim, S.S.

Pengungkit II: Rizki Gayatri, S.S.

Pengungkit III: Diah Rachma Yudita, S.I.P.

Pengungkit IV: Kilep Mariani, S.E.

Pengungkit V: Zamzam Hariro, M.Pd.

Pengungkit VI: Baiq Ayu Candra, S.I.Kom.

Koordinator pengungkit I, yakni Manajemen Perubahan dipilih atas kinerjanya dalam memberikan ide-ide untuk membangun Kantor Bahasa Provinsi NTB

dengan lebih baik. Pengungkit II, yakni Penataan Tata Laksana dipilih atas kecakapan dalam dunia digital dan kompetensi dalam publikasi dan keterbukaan informasi. Individu yang bersangkutan juga merupakan koordinator Tim POS dan POS menjadi salah satu komponen dalam pepenataan tata laksana. Koordinator Pengungkit III, yakni Penataan Sistem Manajemen SDM, dipilih karena kompetensinya dalam menggiatkan program-program terkait peningkatan manajemen SDM. Individu yang bersangkutan juga termasuk dalam salah satu pegawai berprestasi di periode sebelumnya sehingga diharapkan dapat menjadi *role model* dalam melakukan manajemen SDM. Koordinator Pengungkit IV merupakan salah satu pemegang sertifikat PPK dan pernah menjabat sebagai petugas pelaporan. Kompetensi ini dianggap bersesuaian dalam penguatan akuntabilitas Kantor Bahasa Provinsi NTB. Koordinator Pengungkit V memiliki catatan pengalaman dalam menangani aduan dengan cekatan. Koordinator Pengungkit VI selalu terlibat dalam penanganan pelayanan masyarakat. Individu yang bersangkutan juga merupakan koordinator Tim Unit Layanan Terpadu sehingga tugasnya dianggap berkorelasi dengan pelayanan publik.

Begitu pula anggota dari tiap pengungkit juga disesuaikan dengan peran tiap pegawai selama berada di wilayah kerja. Anggota tim kerja tidak hanya terdiri

atas ASN, tetapi juga staf PPNPN. Hal ini mempertimbangkan bahwa dalam pembangunan ZI-WBK, seluruh aspek turut terlibat.

Berikut adalah daftar nama seluruh anggota Tim RBI hasil Rapat Penentuan Tim Kerja ZI-WBK Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah tercantum dalam SK Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB tanggal 13 Januari 2023 dengan nomor 0107/I5.18/LK.06.00/2023.

No.	Nama dan NIP	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Puji Retno Hardiningtyas NIP 198103092006042002	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Penanggung Jawab RBI
2.	Kasman, M.Hum. NIP 197703102005011003	Analisis Kata dan Istilah	Ketua RBI
Tim Manajemen Perubahan			
3.	Nurcholis Muslim, S.S. NIP 197412312006041003	Analisis Kata dan Istilah	Koordinator
4.	Nuryati, S.S. NIP 197309052006042001	Analisis Kata dan Istilah	Anggota

5.	Safoan Abdul Hamid, S.Pd.NIP 197412312006041002	Penerjemah Ahli Muda	Anggota
6.	Gilang Aryo Damar, S.S. NIP 199812192022031007	Pengkaji Bahasa dan Sastra	Anggota
7.	Lentera Nurani Setra, S.S. NIP 199805272022032004	Pengkaji Bahasa dan Sastra	Anggota
Tim Penataan Tata Laksana			
8.	Rizki Gayatri, S.Hum. NIP 199509132019022010	Analisis Kata dan Istilah	Koordinator
9.	Asry Kurniawaty, S.S. NIP198211152010122002	Pengkaji Bahasa dan Sastra	Anggota
10.	Desi Rachmawati, S.Pd. NIP 197612082005012001	Analisis Kata dan Istilah	Anggota
11.	Titik Susiawati, A.Md. NIP 197502042005012001	Pengadministrasi Persuratan	Anggota
12.	Arya Dwy Entaka, S.Pd.	PPNPN	Anggota

Tim Penataan Sistem Manajemen SDM			
13.	Diah Rachma Yudita, S.I.P.NIP 198208152006042001	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	Koordinator
14.	Antun Ariestyono NIP 197804222006041001	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
15.	M. Syamsur Rijal, S.Hum.NIP 199111072022031010	Analisis Kata dan Istilah	Anggota
16.	Siti Nur Djahratil, S.E. NIP 197808022006042002	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	Anggota
17.	Dian Fitri Nurullah, S.Pd.	PPNPN	Anggota
Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
18.	Kilep Mariani, S.E. NIP 198212312006042002	Pengadministrasi Keuangan	Koordinator

19.	Dwi Joko Mursihono, S.Sos.NIP 198001182003121002	Penyusun Program Anggaran dan Laporan	Anggota
20.	I Nyoman Cahyasabudhi S., S.Pd. NIP 197711272005011001	Penerjemah Ahli Muda	Anggota
21.	Ni Luh Wiartini, A.Md. NIP 197507042006042001	Bendahara	Anggota
22.	Fitri Ahyani, S.E. NIP 197909042005012001	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
23.	Ni Wayan Widiartini, A.Md.NIP 198305262006042002	Verifikator Keuangan	Anggota
Tim Penguatan Pengawasan			
24.	Zamzam Hariro, M.Pd. NIP 197802052006041002	Penerjemah Ahli Muda	Koordinator
25.	Toni Samsul Hidayat, M.Pd.NIP 197805162005011002	Penerjemah Ahli Madya	Anggota
26.	Made Ana Susanthi, S.E. NIP 198607092014042002	PengadministrasiKepegawaian	Anggota

27.	Ni Made Yudiastini, S.Pd. NIP 197411032005012001	Analisis Kata dan Istilah	Anggota
28.	Eka Wira Atmaja	PPNPN	Anggota
Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
29.	Baiq Ayu Candra, S.I.Kom.NIP 199110032014042001	Pengelola Situs dan Web	Koordinator
30.	Hartanto, S.S. NIP 197709112003121003	Analisis Kata dan Istilah	Anggota
31.	Rondiyah, S.Pd. NIP 199401142022032009	Pengkaji Bahasa dan Sastra	Anggota
32.	Yodi Sumarjana, S.E. NIP 198001042005011001	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
33.	Baiq Rumita, S.Sos. NIP 196512311987032003	Pengadministrasian Perpustakaan	Anggota
34.	Wahyudi NIP 197509272006041003	Pengadministrasian Barang Milik Negara	Anggota

BAB III

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Simpulan

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan penentuan Tim Kerja ZI-WBK sesuai dengan mekanisme penentuan dan kriteria yang telah ditentukan. Penentuan tim dilakukan dengan terbuka bersama koordinator tim RBI di tahun sebelumnya. Pertimbangan anggota Tim Kerja ZI-WBK berdasarkan pada kompetensi pegawai sesuai dengan komponen area perubahan pembangunan ZI-WBK.

3.2 Rekomendasi

Tindak lanjut dari dibentuknya Tim Kerja ZI-WBK adalah sebagai berikut.

- (1) Setiap pengungkit menyusun rencana kerja ZI-WBK periode anggaran 2023.
- (2) Rencana kerja dilakukan melalui rapat penyusunan rencana kerja.
- (3) Bukti seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Tim Kerja didokumentasikan dengan baik.
- (4) Perlu dilakukan evaluasi kinerja Tim Kerja ZI-WBK di tahun-tahun sebelumnya.

Lampiran

Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Mekanisme Penentuan Tim Kerja ZI-WBK dan Pemilihan Tim Kerja ZI-WBK



